

UPAYA KBRI MANILA DALAM PEMBEBASAN WNI DARI PENYANDERAAN KELOMPOK ABU SAYYAF

Indah Pratikasari¹ dan Sri Muryantini²

Abstract

This paper discusses the efforts of the Embassy of the Republic of Indonesia in Manila in the release of Indonesian crew members who were held hostage by the Abu Sayyaf group during 2016. It applies the negotiation theory which is one of the diplomatic functions performed to provide Service and protection of Indonesian citizens abroad. The data used in analyzing this thesis take a lot of source which come from direct interview with Minister Counselor of Political Affairs of Indonesian Embassy in Manila in Philippines and also reports, books, newspapers and various sources from internet. This paper concludes that the policies made and carried out by the Government of Indonesia and the Indonesian Embassy in Manila in performing its role as RI Representative in the Philippines in order to free the Indonesian crew members who were taken hostage by the Abu Sayyaf group in the South Philippines region. However, in the process of acquittal, an intensive negotiation process is needed both with the Philippine government and with the Abu Sayyaf using the negotiation strategy in order to achieve a win-win solution without having to use weapons or pay ranson in the form of money demanded by the hostage taker.

Keywords: Indonesia citizen, hostage, the Philippines, Abu Sayyaf

Pendahuluan

Filipina sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan sebagai negara anggota *Association of Southeast Asian Nations*(ASEAN) menjadi tantangan tersendiri bagi Perwakilan Republik Indonesia (RI) di Filipina dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Hal ini terutama terkait arus pergerakan manusia serta kerentanan transnasional. Kompleksitas permasalahan penyanderaan yang sering timbul di wilayah Filipina Selatan oleh kelompok separatis Abu Sayyaf menjadi tantangan tersendiri bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila dalam memberikan perlindungan WNI yang berprofesi sebagai awak kapal. Bidang pekerjaan yang melibatkan banyak aktor lintas negara ini perlu penanganan khusus dan komprehensif yang memerlukan koordinasi dan

¹ Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta.

² Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. Email: tini.nap@gmail.com

negosiasi khususnya KBRI Manila (“Laporan Kinerja Tahun 2015 KBRI Manila”, <http://www.kemlu.go.id/manila/id/tentang-perwakilan/Documents/LKJ%202015.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.)

Penelitian mengenai Upaya KBRI Manila dalam pembebasan WNI dari penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf merupakan bagian penting dari Pelayanan Publik dan Perlindungan Perwakilan RI di luar negeri terhadap WNI, khususnya di Filipina. Penelitian ini dilakukan karena selama tahun 2016 tercatat adanya sejumlah kasus yang menjerat WNI di Filipina khususnya yang berprofesi sebagai awak kapal. Salah satu kasusnya yaitu maraknya penyanderaan terhadap awak kapal WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina diantaranya penyanderaan 10 Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tongkang Brahma 12 pada 26 Maret 2016, penyanderaan empat ABK kapal tunda Henry pada 15 April 2016. Setelah itu, Abu Sayyaf kembali melakukan penyanderaan terhadap 7 ABK Charles 001 pada 20 Juni 2016, penyanderaan tiga ABK Pukat Tunda pada 9 Juli 2016, dan penyanderaan satu WNI yang merupakan kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia pada 3 Agustus 2016. Selanjutnya penculikan juga dilakukan terhadap dua Nahkoda dari kapal SK 00520 F dan kapal SN 1154/4F di perairan Sabah pada 5 November 2016. Selain itu dalam bulan yang sama penculikan menimpa dua awak kapal asal Indonesia dari kapal bernomor VW 1738 pada saat tengah mencari ikan di perairan Sabah pada 19 November 2016 (Lutfy Mairizal Putra, “Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun Ini“, <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanjang.tahun.ini.?page=all>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016)

Pembahasan

Kebijakan KBRI Manila Dalam Pembebasan WNI

Stabilitas keamanan di Filipina Selatan seperti gerakan separatistis di Mindanao berdampak terhadap kehidupan WNI dan keamanan wilayah Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Setelah Nur Misuari mencapai kesepakatannya antara Pemerintah dengan Kelompok *Moro Nationalist Liberation Front* (MNLF)-nya dalam proses perdamaian dengan otonomi khusus dari Pemerintah Filipina, namun kegiatan separatisme dari kelompok lainnya belum padam antara lain gerakan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok Abu

Sayyaf melakukan aksi bersenjata atas aparat keamanan Filipina dan melakukan penculikan terhadap orang asing, termasuk WNI.

Penyanderaan ABK WNI yang sering terjadi merupakan bagian dari penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri salah satunya di Filipina. Sepanjang tahun 2016, dan dalam kurun waktu 8 bulan (Maret hingga November 2016), telah terjadi 7 kali insiden penyanderaan terhadap total 29 orang ABK dan nelayan WNI di wilayah Filipina Selatan. Para penyandera mengklaim diri mereka sebagai bagian dari kelompok Abu Sayyaf. Sampai dengan Desember 2016, Pemerintah Indonesia dengan bantuan berbagai pihak khususnya KBRI Manila bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait telah membebaskan 25 sandera dengan selamat (Kemlu RI, 2015:24)

Strategi Pembebasan Sandera: Bekerjasama dengan Pemerintah Filipina

Isu perlindungan WNI sebagai isu prioritas utama dalam agenda kerja Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Perwakilan RI sebagai bagian dari implementasi sembilan agenda kerja Presiden Joko Widodo. Indonesia mengedepankan *soft power* dengan negosiasi minim korban jiwa dan biaya. Dalam hal pembebasan sandera awak kapal WNI ini, KBRI Manila menggunakan strategi melalui jalur diplomasi. Jalur diplomasi tersebut dilakukan dengan cara pendekatan dan pembicaraan dengan Pemerintah Filipina dengan tujuan menentukan opsi dalam upaya pembebasan sandera awak kapal WNI dari kelompok Abu Sayyaf. Proses pendekatan dan pembicaraan dengan Pemerintah Filipina dilakukan dengan upaya sebagai *partner* dalam melawan kelompok pemberontak Abu Sayyaf.

Berikut ini merupakan kasus-kasus penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap awak kapal asal Indonesia pada tahun 2016 (Putra, 2016):

- a. Penyanderaan 26 Maret 2016, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap ABK asal Indonesia berjumlah 10 orang. 10 WNI tersebut merupakan ABK dari kapal TB Brahma 12 yang sedang berlayar melewati perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan.
- b. 15 April 2016, empat orang ABK asal Indonesia dari kapal TB Henry yang sedang berlayar melewati perairan Sulu, Filipina Selatan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

- c. 20 Juni 2016, ABK asal Indonesia kembali disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. Korban yang disandera berjumlah tujuh orang yang merupakan ABK dari kapal TB Charles 001.
- d. 9 Juli 2016, Abu Sayyaf menyandera tiga orang ABK Indonesia dari kapal pukat penangkap ikan berbendera Malaysia di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia.
- e. 3 Agustus 2016, kasus penyanderaan kembali terjadi terhadap seorang WNI yang merupakan kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia.
- f. 5 November 2016, kelompok Abu Sayyaf menyandera dua nahkoda WNI ketika sedang berlayar menggunakan kapal yang berbeda yaitu SK 00520 F dan SN 1154/4F di perairan Sabah, Malaysia.
- g. 19 November 2016, kelompok Abu Sayyaf menyandera dua anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan Malaysia bernomor VW 1738 pada saat tengah mencari ikan di perairan Sabah, Malaysia.

Mengatasi kasus penculikan WNI oleh ASG, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membebaskan para WNI. Pada kenyataannya, tanpa intervensi TNI di lapangan maupun uang tebusan, para sandera Indonesia dapat dibebaskan dengan selamat dan telah dipulangkan ke Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyatakan bahwa upaya pembebasan para sandera Indonesia merupakan wujud dari keberhasilan diplomasi total yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia. Diplomasi total pada hakekatnya merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan, baik secara formal maupun informal, dengan melibatkan banyak pihak, tidak hanya antara pemerintah dengan pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta, melalui jaringan-jaringan informal (Wangke, 2016:5).

Pembebasan dan penyelamatan para ABK WNI menjadi tujuan utama diplomasi total yang dipraktikkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Filipina. Selanjutnya, sesuai dengan karakter diplomasi total yang melibatkan banyak aktor, negosiasi yang terjadi bukan hanya melibatkan aktor negara saja tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-negara. Dengan kata lain, pelibatan aktor formal maupun

nonformal dilakukan agar pembebasan 14 ABK yang disandera pada bulan Maret dan April dapat berjalan cepat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Wangke, 2016:6)

Sejak 26 Maret 2016, pemerintah Indonesia berkoordinasi langsung dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera. Dalam pertemuan dengan presiden Filipina maupun pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Filipina dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina tampak jelas komitmen kuat pemerintah Filipina untuk melakukan upaya terbaik dalam usaha pelepasan sandera WNI. Terdapat dua opsi yang digunakan yaitu diplomasi atau penggunaan kekuatan militer sebagai pilihan terakhir. Selama proses negosiasi dilakukan, Indonesia juga sempat menawarkan pihak Filipina untuk meminta izin menggunakan kekuatan militer dalam upaya pembebasan WNI. Pasukan TNI juga telah disiapkan di sekitar wilayah Kalimantan menunggu perintah melaksanakan kekuatan militer. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak Filipina. Hasil dari negosiasi dengan pihak Filipina, terdapat 4 poin yang diperoleh, antara lain (Muhammad Taufiqqurahman, “Pembebasan 10 Sandera WNI di Filipina: Diplomasi Tanpa Bedil”, <http://news.detik.com/berita/3201168/pembebasan-10-sandera-wni-di-filipina-diplomasi-tanpa-bedil?mpnews>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.): Pertama, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera WNI. Kedua, menekankan kembali mengenai pentingnya keselamatan WNI. Ketiga, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang sejauh ini telah diberikan oleh otoritas Filipina dalam rangka koordinasi pelepasan sandera, dan keempat, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Pembukaan Jejaring, Jalur Informasi dan *contact persons* dari Berbagai Pihak di Wilayah Mindanao Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Minister Counsellor of Political Affairs* di KBRI Manila pada tanggal 28 April 2017, beliau mengatakan bahwa setelah diterimanya informasi penyanderaan WNI, seluruh staf KBRI Manila yang berasal dari unsur-unsur Atase Pertahanan, Atase Kepolisian dan Sekkabsus serta Fungsi Politik dan Fungsi Protokol Konsuler telah melakukan pembukaan jejaring, jalur informasi dan kontak langsung dengan berbagai pihak yang dianggap kompeten dan mempunyai informasi atas isu penyanderaan tersebut baik dari Pemerintahannya maupun tokoh agama, lembaga

swadaya masyarakat dan unsur lainnya baik di Pusat maupun di wilayah Mindanao Selatan dan terjun langsung ke lapangan.

Strategi Negosiasi Pembebasan Sandera ABK WNI di Filipina

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan narasumber yang sama, beliau mengatakan bahwa dalam upaya pembebasan sandera ini, strategi negosiasi yang dipilih tentunya *win-win solution* dimana dari masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

Tahapan negosiasi tersebut diantaranya :

1. Pada tahapan persiapan, pihak negosiator melakukan identifikasi masalah, sehingga dapat diketahui aktor utama penyebab masalah tersebut untuk lebih lanjut agar dapat menggali informasi mengenai latar belakang pelaku. Selanjutnya menyiapkan tim dan strategi dalam upaya pembebasan yang akan berupaya untuk membuka jejaring, informasi dan komunikasi dari berbagai pihak di Mindanao Selatan.
2. Dalam tahap orientasi, para negosiator bertukar dan mencari informasi mengenai pihak penyandera, menggali informasi lebih lanjut mengenai kepentingan pelaku dari berbagai sumber sehingga dapat diajukan penawaran tahap awal.
3. Selanjutnya, pada tahap tawar menawar para negosiator melakukan penawaran dengan pihak penyandera mengenai ransum yang diminta oleh penyandera dengan menggantikannya berupa tawaran dalam ransum bentuk lain. Ransum tersebut terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya ransum dapat dalam bentuk uang, ransum dalam bentuk senjata sesuai permintaan penyandera, atau ransum dalam bentuk lainnya seperti pendidikan dan perbaikan sarana ibadah. Bentuk ransum yang diminta oleh pihak penyandera yaitu ransum dalam bentuk uang, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan membeli senjata guna memperkuat kelengkapan persenjataan kelompok tersebut. Tetapi tim negosiator pada tahap tawar menawar ini berupaya untuk menggantikan ransum dalam bentuk uang tersebut ke dalam bentuk ransum yang lain. Alasan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa uang dan senjata akan habis, sehingga negosiator menawarkan opsi lain yang berkaitan dengan kepentingan utama yaitu sesuatu yang bisa menjamin masa depan anak-anak mereka dan juga kesejahteraan. Ransum yang dimaksud yaitu dengan bentuk implementasi pendidikan yang berupa beasiswa dan juga perbaikan sarana masjid di wilayah Mindanao Selatan.

Melalui berbagai cara, waktu yang cukup lama dan strategi yang matang sehingga pada akhirnya dicapai kesepakatan antara kedua pihak. Strategi dan cara tersebut seperti yang telah dilakukan oleh tim baedowi, dengan menggunakan hasil penelitiannya sebagai proposal untuk melakukan negosiasi dengan kelompok penyandera. Melalui proposal yang telah disiapkan, sehingga dapat membuka jalur negosiasi dengan memanfaatkan kerjasama pendidikan antara Filipina Selatan dengan Indonesia yang sudah terjalin cukup lama (Muhammad Taufiqqurahman, “KBRI Manila: Ini Kerja Sama Diplomat, TNI, Intel Dan Lembaga Internasional”, <http://news.detik.com/berita/d-3201120/kbri-manila-ini-kerja-sama-diplomat-tni-intel-dan-lembaga-internasional/komentar>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017)

Dalam menjalankan proposal tersebut terdapat keterlibatan dari tokoh masyarakat lainnya. Keterlibatan masyarakat juga dilakukan Indonesia antara lain dengan mengandalkan pihak-pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa penyanderaan ini terutama yang mempunyai akses komunikasi dengan penyandera. Dalam menjalankan negosiasi melalui pendekatan pendidikan juga melibatkan Yayasan Sukma (Sekolah Sukma Bangsa di Aceh) yang di gerakkan oleh Ahmad Baedowi dan Samsul Rizal Panggabean dalam proses pembebasan sandera. Bapak Eddy Mulya meyakini bahwa adanya keterkaitan antara proposal yang dibuatnya dengan peran Yayasan Sukma yang akan dilakukan dalam proses negosiasi tersebut. Hal ini didasarkan pada keadaan geografis dan kondisi pendidikan di wilayah Filipina Selatan tersebut. Yayasan ini telah diketahui terlibat dengan berbagai kerja sama pendidikan, termasuk dengan pesantren-pesantren di Moro Selatan, Filipina. Sehingga, pendekatan pendidikan dipilih sebagai alat untuk melakukan negosiasi pembebasan karena adanya kerjasama pendidikan antara Yayasan Sukma dan pemerintah otonomi Moro Selatan (Muhammad Taufiqqurahman, “KBRI Manila: Ini Kerja Sama Diplomat, TNI, Intel Dan Lembaga Internasional”, <http://news.detik.com/berita/d-3201120/kbri-manila-ini-kerja-sama-diplomat-tni-intel-dan-lembaga-internasional/komentar>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.)

Strategi pendekatan dalam upaya pembebasan sandera ini tidak terlepas dari pendekatan kultural dan sejarah yang dilakukan dalam proses negosiasi. Mengingat dalam sejarah, wilayah Filipina Selatan merupakan bagian dari kepulauan Indonesia dan menjadi bagian penting dari perdagangan dan politik Indonesia, dimana sebuah prasasti beraksara

kawi Jawa kuno juga pernah ditemukan di dekat Manila. Kerajaan Sulu merupakan salah satu kesultanan paling tua di Indonesia, orang Sulu biasanya menyebut diri mereka dengan Tausug.

Tahapan Pembebasan WNI dari Penyanderaan Abu Sayyaf

Dalam kurun waktu satu tahun, ASG telah berhasil melancarkan aksinya dengan melakukan penyanderaan terhadap WNI. Selama tahun 2016, ASG telah menyandera awak kapal asal Indonesia sebanyak tujuh kali proses penyanderaan. Jumlah keseluruhan awak kapal WNI yang disandera sebanyak 29 orang. Berikut merupakan tahapan pembebasan 25 WNI dari penyanderaan kelompok militan Abu Sayyaf:

1. Pembebasan 10 WNI (Penyanderaan 26 Maret 2016)

Pembebasan sandera WNI dari ASG memerlukan strategi yang kuat, mengingat keselamatan WNI menjadi prioritas utama. Pembebasan 10 ABK WNI yang disandera pada 26 Maret 2016, merupakan upaya pertama Tim negosiator dalam menentukan langkah untuk dapat membebaskan para korban sandera dengan selamat. Sepuluh sandera WNI adalah awak dari awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Pemeran utama dalam negosiasi pembebasan 10 WNI tersebut yaitu Tim Baedowi.

Sesuai informasi dari narasumber pada saat wawancara mengatakan bahwa KBRI Manila telah mengonfirmasi pembebasan 10 WNI yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf adalah murni menggunakan cara negosiasi. *Minister Counsellor of Political Affairs* KBRI Manila, Bapak Eddy Mulya mengatakan proses pembebasan tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari KBRI, TNI hingga Pemerintah Filipina dan tokoh masyarakat di Filipina Selatan. Dijelaskan juga bahwa proses negosiasi pembebasan 10 WNI ini telah berlangsung cukup lama yaitu lebih dari tiga minggu. Negosiasi ini dilakukan dengan cara pendekatan dan komunikasi yang intensif dengan kelompok Abu Sayyaf (Raynaldo Ghiffari Lubabah, “Ini cerita tim negosiator bebaskan 10 WNI dari Abu Sayyaf”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-cerita-tim-negosiator-bebaskan-10-wni-dari-abu-sayyaf.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017) dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat guna memberikan dukungan dan tekanan agar tercapainya kesepakatan negosiasi. Usaha Indonesia dengan menggunakan diplomasi tanpa senjata itu akhirnya

memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Pada tanggal 31 April 2016 waktu dini hari di Filipina, pihak kelompok Abu Sayyaf akhirnya membebaskan 10 WNI tersebut.

2. Pembebasan 4 WNI (Penyanderaan 15 April 2016)

Keempat ABK kapal tunda Henry disandera kelompok Abu Sayyaf saat berlayar menarik tongkang Christy kembali ke Tarakan, Kalimantan Utara, dari Cebu, Filipina. Pembajakan ini terjadi di perairan timur bagian Sabah, Malaysia, pada 15 April 2016. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tim negosiator pembebasan empat WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk memperkuat kerja sama dalam membebaskan empat anak buah kapal tunda TB Henry (Media Indonesia, 4 Mei 2016). Dalam upaya pembebasan sandera ini, operasi di lapangan berada dibawah koordinasi KBRI di Manila.

Pembebasan empat WNI yang disandera ASG tidak terlepas dari peran penting, kepala MNLF yaitu Nur Misuari. Menurut pihak MNLF, Misuari berperan langsung dalam melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Negosiasi ini dilakukan tanpa terdeteksi militer Filipina sehingga disebut sebagai bagian dari operasi senyap yang melibatkan mantan Jenderal Angkatan Darat Indonesia, Kivlan Zein. Sosok Misuari bukan negosiator dan pejuang MNLF biasa. Dari data latar belakangnya, Misuari merupakan keturunan panglima dari Kesultanan Sulu, yang mana pernah menjadi dosen di sebuah universitas ternama di Filipina sebelum terjun ke politik melalui MNLF. Sehingga melalui *background* tersebut, komunikasi dalam melakukan negosiasi dapat dilakukan secara intensif (Muhaimin, “Mengenal Misuari, Tokoh Pembebas 14 WNI dari Abu Sayyaf”, <https://international.sindonews.com/read/1107972/177/mengenal-misuari-tokoh-pembebas-14-wni-dari-abu-sayyaf-1463046001>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017).

3. Pembebasan 7 WNI (Penyanderaan 20 Juni 2016)

Penyanderaan terhadap tujuh WNI ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2016. ASG menyandera ketujuh awak kapal dari kapal TB Charles 001 yang sedang berlayar menarik kapal tongkang (TK) Robby 152 di Laut Sulu, Filipina Selatan. Penculikan dilakukan dua

kali. Pertama, dilakukan terhadap tiga orang, yaitu Kapten Fery Arifin (nahkoda), Muhammad Mahbrur Dahri (KKM) dan Edy Suryono (Masinis II). Kedua, dalam waktu satu setengah jam kemudian, terjadi penyanderaan terhadap empat ABK WNI lainnya (dilakukan oleh kelompok berbeda), yaitu Ismail (Mualim I), Robin Piter (Juru Mudi), Muhammad Nasir (Masinis III) dan Muhammad Sofyan (Oilman). Pihak penyandera meminta uang tebusan untuk membebaskan para awak kapal WNI sebesar 60 miliar rupiah. Namun pemerintah Indonesia seperti pada kasus sebelumnya tidak menuruti permintaan penyandera dengan memberikan sejumlah uang yang diminta, melainkan dalam upaya pembebasan ketujuh WNI ini menggunakan berbagai strategi untuk melakukan negosiasi total.

Pembebasan ketujuh sandera ini tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan terbagi dalam tiga tahap. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 2016, dua orang sandera diantaranya telah berhasil meloloskan diri dari kelompok Abu Sayyaf. Dua WNI tersebut yakni bernama Mohammad Sofyan dan Ismail Tiro. Sofyan sempat ditempatkan di Zamboanga oleh pihak otoritas Filipina, sementara Ismail berada di Sulu. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan bebasnya dua sandera WNI disebabkan oleh gempuran militer Filipina terhadap kelompok Abu Sayyaf. Menurut Ryamizard, serangan yang dilancarkan oleh Filipina membuat ASG kehilangan banyak kekuatan sehingga konsentrasi terhadap tawanan terpecah. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bebasnya dua orang sandera adalah bukti kerja sama dari Pemerintah Filipina yang mempunyai komitmen membebaskan sandera. Selanjutnya, dalam upaya pembebasan sandera lainnya pihak otoritas Filipina dan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Filipina masih melakukan wawancara terhadap dua WNI. Hal tersebut dilakukan untuk menggali lebih lanjut mengenai informasi lengkap yang dibutuhkan dalam proses pembebasan sandera yang lain (Kristian Erdianto, “Menhan: Gempuran Militer Filipina Membuka Celah Dua WNI Meloloskan Diri”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/11184731/menhan.gempuran.militer.filipina.membuka.celah.dua.wni.meloloskan.diri>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017).

Dalam upaya pembebasan kelima WNI lainnya, Indonesia kembali melakukan negosiasi dengan pemimpin MNLF yaitu Nur Misuari. Upaya pembebasan kali ini berada pada otoritas Kemlu RI dibawah koordinasi Direktorat Perlindungan Warga Negara

Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Indonesia berhasil membebaskan tiga WNI yang merupakan awak kapal TB Charles 001 yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Ketiga WNI tersebut adalah Ferry Arifin asal Samarinda, Edi Suryono dan Muhammad Mahbrur Dahri dari Sulawesi Selatan. Terkait dua WNI yang masih disandera, Menlu RI, Retno Marsudi menyampaikan bahwa upaya pembebasan terus dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Ihsanuddin, “Menlu Serahkan Tiga WNI yang Dibebaskan Abu Sayyaf kepada Keluarga”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/08/12064131/menlu.serahkan.tiga.wni.yang.dibebaskan.abu.sayyaf.kepada.keluarga>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017). Juru Bicara Kemlu RI Arrmanantha Nasir menuturkan, bahwa Kemlu RI dan KBRI Manila bertugas untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Filipina dan berbagai pihak di Filipina Selatan. Semua upaya yang dilakukan dengan melihat langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk membebaskan para sandera dari Abu Sayyaf (Lutfy Mairizal Putra, “Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan Dua WNI yang Disandera di Filipina”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/20534931/pemerintah.terus.upayakan.pembebasan.dua.wni.yang.disandera.di.filipina>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017).

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, keberhasilan ini merupakan kerjasama dari banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi melibatkan pihak lain dengan memanfaatkan jasa baik MNLF. Iqbal menjelaskan, Misuari berperan banyak dalam upaya pembebasan. Melalui bantuan pemimpin MNLF tersebut, ketujuh WNI bisa lepas dengan selamat. Ia menyampaikan, Misuari dalam upaya pembebasan melakukan kontak dengan pimpinan sandera dari penculikan tujuh WNI ini yaitu Al Habsi Misaya. Pria ini diduga sebagai salah satu pemimpin kelompok Abu Sayyaf.

Pada tanggal 12 Desember 2016, pemerintah RI kembali berhasil membebaskan dua WNI ABK TB Charles dari tangan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, usai melakukan diplomasi dan negosiasi selama enam bulan, akhirnya seluruh warga negara Indonesia ABK TB Charles berhasil dibebaskan. Mereka disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Filipina Selatan. Kedua WNI yang dibebaskan tersebut adalah Robin Piter asal Samarinda dan Muhamad Sofyan asal Sulawesi Selatan (Andreas Gerry Tuwo,

“Kemlu: Pembebasan 7 WNI Sandera Abu Sayyaf Manfaatkan Jasa MNLF”, <http://global.liputan6.com/read/2677191/kemlu-pembebasan-7-wni-sandera-abu-sayyaf-manfaatkan-jasa-mnlf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017).

4. Pembebasan 3 WNI (Penyanderaan 9 Juli 2016)

Tiga WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada 9 Juli 2016 telah dibebaskan. Perompakan ini terjadi ketika kapal pukat penangkap ikan LLD113/5/F berbendera Malaysia yang ditumpangi oleh ketiga WNI tersebut sedang mencari ikan di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia. Ketiga sandera tersebut adalah Lorence Koten, Theodorus Kopong, dan Emanuel yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam pembebasan ketiga sandera tersebut tak lepas dari kerja keras Tim negosiator Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan pihak MNLF untuk dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak penyandera.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pembebasan tiga WNI dari kelompok Abu Sayyaf dihasilkan atas kerja sama militer Filipina dan kelompok MNLF. Peran pasukan MNLF cukup dominan dalam pembebasan sandera. Pasukan MNLF dinilai lebih memahami kondisi medan dan mengetahui tempat-tempat persembunyian kelompok Abu Sayyaf. Pembebasan ketiga sandera ini murni dilakukan karena tekanan yang dilakukan pasukan militer Filipina dan pasukan MNLF. Ryamizard memastikan bahwa tidak ada sepeser pun uang tebusan yang diberikan dalam proses pembebasan sandera. Pemerintah Filipina mengerahkan sebanyak 10.000 (personel), terakhir ada sebanyak 22.000 personel di satu pulau dan juga dibantu oleh pasukan MNLF (Abba Gabrillin, “Menhan: Pembebasan Sandera atas Kerja Sama Militer Filipina dan MNLF”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/19/09331961/menhan.pembebasan.sandera.atas.kerja.sama.militer.filipina.dan.mnlf>, diakses pada tanggal 18 Maret 2017).

5. Pembebasan 1 WNI (Penyanderaan 3 Agustus 2016) Komandan pasukan Filipina, Brigadir Jenderal Arnel dela Vega mengatakan bahwa kelompok militan Abu Sayyaf telah membebaskan Herman bin Manggak, WNI yang disandera di sebuah pulau terpencil di Filipina Selatan. Jenderal Arnel Dela Vega juga mengatakan bahwa pembebasan korban penyanderaan ini merupakan hasil dari upaya terus-menerus dari pihak militer, dibantu

oleh berbagai pihak, terutama unit pemerintah lokal dari Sulu dan sejumlah pemangku kepentingan. Pembebasan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Abu Sayyaf membebaskan tiga sandera WNI lainnya (“Herman Bin Manggak Pelaut Indonesia Dibebaskan Abu Sayyaf”, <http://beritatrans.com/2016/09/22/herman-bin-manggak-pelaut-indonesia-dibebaskan-abu-sayyaf/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017).

Herman Manggak merupakan WNI yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan yang berprofesi sebagai kapten kapal berbendera Malaysia. Herman Bin Manggak diculik oleh sekelompok pria bersenjata yang merupakan kelompok Abu Sayyaf di perairan Sandakan, Sabah, Malaysia pada 3 Agustus 2016. Kemudian pada 22 September 2016, ASG membebaskan Herman yang ditawan selama tujuh pekan di pedalaman Filipina Selatan. Herman mengalami pengekangan selama 50 hari di Pulau Jolo, yang merupakan basis terkuat ASG sebelum diserahkan kepada MNLF. Menurut juru bicara Komando Mindanao Barat, Maj Filemon Tan, Herman diserahkan ke kelompok MNLF, dan kemudian diserahkan ke sejumlah pejabat Pasukan Satuan Tugas Sulu (JTFS). Selanjutnya Herman diserahkan kepada Kosulat Jenderal RI Davao di markas Wesmincom, Zamboanga, Filipina. Mayjen (Purn.) Kivlan Zein, mengatakan bahwa Herman terbebas setelah pasukan Filipina yang didukung oleh MNLF melakukan operasi militer besar-besaran ke markas Abu Sayyaf. Operasi militer pada 17 Agustus 2016 tersebut membuat kelompok Abu Sayyaf terdesak. Pemimpin tertinggi kelompok Abu Sayyaf, Al Habsy Misaya, tewas dalam baku tembak dengan pasukan MNLF (Jawa Pos, 20 September 2016).

Kesimpulan

Upaya KBRI Manila dalam Pelayanan Publik dan Perlindungan terhadap WNI di Filipina, khususnya dalam studi kasus pembebasan para ABK WNI yang di sandera oleh ASG telah berhasil dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi yang dilakukan oleh KBRI Manila dalam hal ini diantaranya yaitu melakukan strategi pendekatan dan pembicaraan dengan Pemerintah Filipina agar diperoleh solusi terbaik dalam upaya pembebasan para korban sandera. Selanjutnya KBRI Manila juga berupaya dalam membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk melakukan negosiasi baik secara terbuka maupun tertutup dengan pihak penyandera.

Mengingat adanya persamaan budaya khususnya keagamaan di wilayah Filipina Selatan dengan Indonesia, sehingga langkah ini digunakan sebagai alat utama dalam negosiasi melalui bantuan tokoh ulama di wilayah tersebut. Pendekatan tokoh agama tersebut didorong karena masih rendahnya pemahaman masyarakat Filipina Selatan khususnya ASG dan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh ASG terkait nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Proses pendekatan ini tidak dilakukan secara singkat, namun dibutuhkan waktu lama dan proses pendekatan yang berulang-ulang hingga pada akhirnya dapat disadari adanya pelanggaran dari nilai-nilai keagamaan yang telah dilakukan.

Dengan demikian, keberhasilan pembebasan 10 ABK WNI dari penyanderaan ASG karena adanya kerjasama yang kuat dari berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah. Maka terkait kasus ini, kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf perlu lebih intensif, agar aksi penculikan yang dijalankan oleh ASG dapat dihentikan dan peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sehingga sudah seharusnya bagi pihak militer Filipina berada digaris terdepan untuk bertindak lebih dulu menumpas kelompok Abu Sayyaf.

Daftar Pustaka

- (2016). “Herman Bin Manggak Pelaut Indonesia Dibebaskan Abu Sayyaf”, <http://beritatrans.com/2016/09/22/herman-bin-manggak-pelaut-indonesia-dibebaskan-abu-sayyaf/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- (2015). “Laporan Kinerja Tahun 2015 KBRI Manila”, <http://www.kemlu.go.id/manila/id/tentangperwakilan/Documents/LKJ%202015.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). “Penyanderaan ABK Indonesia”, *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2016*, Jakarta.
- (2016). “Satu Lagi Sandera WNI Segera Bebas”, *Jawa Pos*.
- (2016). “Tim Pembebasan 4 WNI di Bawah Menko Polhukam”, *Media Indonesia*.
- Erdianto, Kristian. (2016). “Menhan: Gempuran Militer Filipina Membuka Celah Dua WNI Meloloskan Diri”. <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/11184731/>

menhan.gempuran.militer.filipina.membuka.celah.dua.wni.meloloskan.diri.
diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

Gabrillin, Abba. (2016). "Menhan: Pembebasan Sandera atas Kerja Sama Militer Filipina dan MNLF". <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/19/09331961/menhan.pembebasan.sandera.atas.kerja.sama.militer.filipina.dan.mnlf>. diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

Ihsanuddin. (2016). "Menlu Serahkan Tiga WNI yang Dibebaskan Abu Sayyaf kepada Keluarga". <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/08/12064131/menlu.serahkan.tiga.wni.yang.dibebaskan.abu.sayyaf.kepada.keluarga>. diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

Lubabah, Raynaldo Ghiffari. (2016). "Ini cerita tim negosiator bebaskan 10 WNI dari Abu Sayyaf", <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-cerita-tim-negosiator-bebaskan-10-wni-dari-abu-sayyaf.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Muhaimin. (2016). "Mengenal Misuari, Tokoh Pembebas 14 WNI dari Abu Sayyaf", <https://international.sindonews.com/read/1107972/177/mengenal-misuari-tokoh-pembebas-14-wni-dari-abu-sayyaf-1463046001>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

Putra, Lutfy Mairizal. (2016). "Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun Ini". <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanjang.tahun.ini.?page=all>. diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

Putra, Lutfy Mairizal. (2016). "Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan Dua WNI yang Disandera di Filipina". <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/20534931/pemerintah.terus.upayakan.pembebasan.dua.wni.yang.disandera.di.filipina>. diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

Taufiqqurahman, Muhammad. (2016). "KBRI Manila: Ini Kerja Sama Diplomat, TNI, Intel Dan Lembaga Internasional". <http://news.detik.com/berita/d-3201120/kbri-manila-ini-kerja-sama-diplomat-tni-intel-dan-lembaga-internasional/komentar>. diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Taufiqqurahman, Muhammad. (2016). "Pembebasan 10 Sandera WNI di Filipina: Diplomasi Tanpa Bedil". <http://news.detik.com/berita/3201168/pembebasan-10-sandera-wni-di-filipina-diplomasi-tanpa-bedil?mpnews>. diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Tuwo, Andreas Gerry. (2016). "Kemlu: Pembebasan 7 WNI Sandera Abu Sayyaf Manfaatkan Jasa MNLF". <http://global.liputan6.com/read/2677191/kemlu-pembebasan-7-wni-sandera-abu-sayyaf-manfaatkan-jasa-mnlf>. diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

Wangke, Humphrey. (2016). "Keberhasilan Diplomasi Total". *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. VIII, No. 10/II/P3DI.